BAB II TINJAUAN PUSTAKA

# Program Sekolah Ramah Anak

* + 1. **Sekolah Ramah Anak**

Kata sekolah secara bahasa latin: schole, scola, scolae, schola yang berarti waktu luang untuk memahami apa sebenarnya waktu luang (Kristanto, 2011:43). Sekolah berkaitan erat dengan pendidikan, pengetahuan, dan sikap yang ada dalam masyarakat secara umum terhadap generasi muda. Pendidikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan dan perubahan perilaku peserta didik (Nasution, 2011:11). Setiap hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh seseorang, baik itu terkait pengetahuan maupun tata krama, akan dipahami setelah mendapatkan pendidikan di sekolah. Setelah itu, individu tersebut akan memiliki pengetahuan yang membantunya berinteraksi dengan baik dalam masyarakat dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

UNICEF (2007:49) menyatakan bahwa untuk mengatasi kekerasan di sekolah, diperlukan pendekatan yang efektif yang disesuaikan dengan kondisi tertentu, dengan penanganan berdasarkan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Sekolah yang menerapkan konsep berbasis hak untuk mencegah kekerasan disebut sebagai "sekolah ramah anak." Sekolah ini harus meningkatkan dan melindungi kesejahteraan emosi, psikologis, dan fisik anak dengan menyediakan lingkungan

11

pendidikan yang protektif dan sehat, yang berlaku untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Konsep sekolah ramah anak berkembang dari gagasan yang mendasar bahwa lingkungan pendidikan haruslah lebih dari sekadar tempat pembelajaran, namun juga menjadi wadah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perkembangan holistik anak. UNICEF menggarisbawahi bahwa sekolah ramah anak mencerminkan visi ideal di mana setiap anak merasa sepenuhnya diterima, didengar, dan dihargai, sementara kepentingan dan hak-hak mereka diutamakan dalam semua aspek kehidupan sekolah, mulai dari formulasi kebijakan hingga implementasi praktik pendidikan sehari-hari.

Dengan demikian, sekolah ramah anak bukan hanya tentang menyediakan ruang fisik yang nyaman, tetapi juga menciptakan budaya dan atmosfer yang mempromosikan rasa kepemilikan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta memberikan perlindungan yang tepat bagi kesejahteraan dan hak-hak anak. Melalui pendekatan ini, sekolah ramah anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga untuk membentuk karakter, nilai, dan sikap positif yang akan membekas dalam kehidupan siswa hingga dewasa nanti (Mawaddah Hafifah dan Zaida Nur Aini, 2021).

# Faktor-Faktor Utama dalam Program Sekolah Ramah Anak

Program sekolah ramah anak biasanya melibatkan beberapa faktor kunci yang saling terkait, mencakup aspek partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di sekolah. Ini tidak hanya mencakup peran pasif dalam

mengikuti instruksi, tetapi juga mendorong siswa untuk berperan aktif dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Selain itu, peran guru dalam program ini sangat penting, di mana mereka berfungsi sebagai fasilitator belajar yang mendukung, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan. Guru yang memfasilitasi belajar secara aktif membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan. Selain dari sisi akademis, dukungan dari orang tua dan komunitas juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program sekolah ramah anak.

Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak di rumah, serta dukungan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, memperkuat efek positif dari program ini. Lebih lanjut, lingkungan fisik yang aman dan nyaman juga sangat penting, karena menciptakan ruang yang memungkinkan siswa untuk merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk belajar. Terakhir, implementasi kebijakan yang berbasis hak anak menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan siswa diutamakan dalam setiap kebijakan dan praktik sekolah. Dengan mengintegrasikan semua faktor ini secara holistik, program sekolah ramah anak dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, inklusif, dan merangsang perkembangan optimal siswa secara keseluruhan (Majdi Muhammad dan Ahmad Ichsan Shofiyuddin, 2021).

# Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tak terpisahkan, dan tak dapat diganggu gugat, hanya karena seseorang merupakan manusia. Hak-hak ini diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi apapun, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kolektif. Tujuan utama dari konsep HAM adalah untuk melindungi dan memajukan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia di seluruh dunia, serta menghapus segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Dengan demikian, HAM menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, dan beradab, di mana setiap individu dapat hidup dengan layak dan bermartabat (Triwahyuningsih, Susani, 2018).

# Pentingnya Kesadaran Hak Asasi Manusia

Kesadaran akan hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen kunci dalam mempromosikan perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak-hak dasar setiap individu, menciptakan landasan yang kokoh bagi masyarakat yang inklusif dan beradab. Melalui kesadaran ini, individu dipacu untuk memahami bahwa hak-hak mereka bukanlah hak istimewa, melainkan hak yang melekat pada eksistensi kemanusiaan mereka. Dengan memahami hak-hak ini, individu dapat memperjuangkan keadilan bagi diri mereka sendiri dan orang lain, serta turut berkontribusi dalam

memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan perlindungan yang diperlukan untuk hidup dengan martabat. Kesadaran akan HAM juga merupakan landasan bagi tumbuhnya sikap empati, toleransi, dan solidaritas sosial, yang sangat diperlukan dalam menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai- nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kesadaran akan HAM tidak hanya menciptakan individu yang lebih sadar akan hak-hak mereka, tetapi juga masyarakat yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan, di mana setiap individu dihormati dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keluhuran martabat manusia.

# Pendidikan sebagai Sarana Meningkatkan Kesadaran HAM

Pendidikan memegang peran krusial dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia (HAM) karena menjadi fondasi utama dalam pembentukan nilai-nilai kemanusiaan dan sikap-sikap yang menghargai keberagaman serta hak-hak dasar setiap individu. Dengan melibatkan materi HAM dalam kurikulumnya, pendidikan menciptakan kesempatan bagi siswa untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka, mengenali hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa pandang bulu, serta memahami pentingnya penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam masyarakat yang inklusif dan beradab. Lebih dari sekadar menyampaikan informasi, pembelajaran yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan juga mendorong siswa untuk merenungkan makna sebenarnya dari konsep-konsep HAM dalam konteks kehidupan sehari-hari, memperluas cakrawala pemikiran mereka, serta memupuk sikap empati, toleransi, dan keadilan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya

mengajarkan siswa tentang hak-hak mereka, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan, persamaan, dan martabat manusia bagi semua individu di masyarakat.

# Sekolah Kesetaraan

Sekolah kesetaraan adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada individu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah, atau yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler karena berbagai alasan, seperti pekerjaan, keterbatasan waktu, atau kondisi pribadi. Sekolah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi hak yang dapat diakses oleh semua individu, tanpa diskriminasi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi mereka. Dengan kurikulum yang fleksibel dan terpadu, sekolah kesetaraan memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta mendukung mereka dalam mencapai tujuan pendidikan mereka. Melalui pendekatan ini, sekolah kesetaraan berperan penting dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan literasi, dan memajukan kesetaraan pendidikan di masyarakat (Utami. P, 2022).

# Tujuan dan Manfaat Sekolah Kesetaraan

Tujuan utama dari Sekolah Kesetaraan Paket A adalah memastikan bahwa pendidikan menjadi hak yang dapat diakses oleh semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi pribadi mereka. Dengan menyediakan akses pendidikan kepada mereka yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, seperti

yang telah putus sekolah, yang sedang bekerja, atau memiliki keterbatasan waktu, Sekolah Kesetaraan Paket A berperan sebagai jembatan menuju kesempatan pendidikan yang setara bagi semua. Melalui kesempatan belajar ini, sekolah ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membantu meningkatkan literasi, keterampilan, dan pengetahuan mereka, yang menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, Sekolah Kesetaraan Paket A berperan sebagai motor penggerak sosial yang membuka pintu kesempatan bagi individu-individu yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan atau terbatasi, membawa harapan untuk masa depan yang lebih cerah dan berdaya bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

# Metode Pembelajaran di Sekolah Kesetaraan

Metode pembelajaran di Sekolah Kesetaraan didesain untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, fleksibel, dan efektif bagi semua siswa. Pendekatan pembelajaran yang digunakan mencakup beragam strategi, seperti penggunaan modul pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, diskusi kelompok yang mendorong interaksi antar siswa dan pertukaran ide, tutorial individu yang memberikan perhatian khusus pada setiap siswa, dan praktik lapangan yang mengintegrasikan pembelajaran dalam konteks nyata. Dengan kombinasi metode ini, Sekolah Kesetaraan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan tempo dan gaya belajar mereka sendiri, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk

mencapai tujuan pendidikan mereka. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti e-learning atau penggunaan perangkat lunak pembelajaran, juga semakin umum diimplementasikan untuk memperluas akses dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan demikian, metode pembelajaran di Sekolah Kesetaraan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian siswa, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan dunia kerja.

# Teori Implementasi

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III adalah salah satu kerangka teori yang sering digunakan dalam analisis kebijakan publik. Edward III mengidentifikasi empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

* + - 1. Komunikasi (communication)

Komunikasi merupakan faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, tanpa komunikasi yang jelas dan efektif, kebijakan yang telah dirancang dengan baik pun dapat mengalami kegagalan dalam tahap implementasi. Komunikasi yang dimaksud bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan—termasuk para pelaksana di lapangan, pimpinan, hingga penerima kebijakan—memahami secara penuh tujuan, sasaran, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam

proses pelaksanaannya. Edward III menekankan pentingnya penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat untuk memastikan bahwa kebijakan diterima dan dipahami secara seragam oleh semua pihak.

Selain itu, komunikasi yang baik juga melibatkan umpan balik dari para pelaksana kebijakan, sehingga jika ada kendala atau ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan, hal tersebut dapat segera diketahui dan diperbaiki. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan berbagai kesalahpahaman, yang pada akhirnya berpotensi menggagalkan pencapaian tujuan kebijakan. Misalnya, jika instruksi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan tidak dipahami dengan benar, atau jika terdapat informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, pelaksana mungkin akan mengambil langkah- langkah yang salah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk tidak hanya memberikan instruksi yang jelas, tetapi juga memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan responsif agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

* + - 1. Sumber daya (Resources)

Sumber daya yang memadai memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut George C. Edward III, sumber daya ini dapat berupa finansial, manusia, maupun sarana dan prasarana. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan dapat dijalankan secara efektif, dan bahkan bisa berujung pada kegagalan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Finansial, misalnya, sangat berperan dalam mendanai berbagai kebutuhan operasional seperti pelatihan, pengadaan alat dan teknologi, atau mendukung pelaksanaan program secara keseluruhan. Jika anggaran yang disediakan tidak memadai, banyak aspek kebijakan yang mungkin terhambat, seperti penyediaan fasilitas, remunerasi yang layak bagi para pelaksana, atau dukungan logistik lainnya.

Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan elemen kunci. Tenaga ahli yang kompeten dan terampil sangat dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan dengan baik. Mereka harus memiliki pemahaman yang tepat tentang kebijakan yang diimplementasikan serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efisien. Jika tidak ada sumber daya manusia yang memadai, kebijakan mungkin akan dijalankan dengan kualitas rendah atau bahkan disalahartikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan telah mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sarana dan prasarana juga tidak kalah pentingnya. Ini mencakup teknologi, peralatan, fasilitas fisik, dan infrastruktur pendukung lainnya yang membantu kelancaran proses implementasi kebijakan. Misalnya, jika kebijakan menuntut penggunaan teknologi tertentu, maka ketersediaan perangkat dan jaringan yang andal menjadi sangat penting. Demikian pula, fasilitas fisik yang memadai seperti ruang kerja, pusat pelatihan, atau perangkat pendukung

lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terkait dengan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan hasil yang diinginkan sulit dicapai.

* + - 1. Disposisi (Disposition)

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan dukungan yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan terhadap suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, disposisi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif, mendukung sepenuhnya kebijakan yang diamanatkan, dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankannya, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap positif ini mencakup kesediaan pelaksana untuk bekerja keras, melaksanakan tugas dengan dedikasi, serta mematuhi setiap aturan atau pedoman yang ditetapkan dalam kebijakan.

Di sisi lain, jika pelaksana kebijakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut, meragukan manfaatnya, atau tidak memiliki komitmen yang cukup kuat, maka proses implementasi akan menghadapi hambatan. Pelaksana yang tidak memiliki dukungan penuh cenderung akan menjalankan kebijakan dengan setengah hati, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pelaksanaannya. Kurangnya komitmen juga bisa membuat pelaksana tidak berusaha untuk

mengatasi masalah atau tantangan yang muncul selama proses implementasi, dan kebijakan mungkin tidak dijalankan secara optimal. Sebagai contoh, dalam organisasi, kebijakan yang dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi para pelaksana mungkin tidak mendapatkan perhatian atau upaya yang memadai, sehingga hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut tidak tercapai.

Selain itu, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan kerja, dukungan dari pimpinan, serta kesejahteraan atau insentif yang diberikan. Ketika para pelaksana merasa didukung oleh institusi atau mendapatkan penghargaan atas kerja keras mereka, motivasi dan komitmen mereka dalam melaksanakan kebijakan akan meningkat. Sebaliknya, ketidakjelasan tujuan, kurangnya dukungan, atau beban kerja yang berlebihan dapat memengaruhi sikap mereka secara negatif, yang pada gilirannya dapat menghambat keberhasilan kebijakan.

Oleh karena itu, penting bagi para perancang kebijakan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi untuk memastikan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik, setuju dengan tujuan kebijakan, serta didukung dengan komitmen yang memadai. Hanya dengan dukungan penuh dari para pelaksana, kebijakan dapat diterapkan dengan benar dan menghasilkan dampak yang diinginkan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

* + - 1. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Edward III, prosedur yang jelas, koordinasi yang baik antarunit, serta rantai komando yang efisien adalah elemen kunci dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang rumit memerlukan struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik agar setiap pelaksana memahami tanggung jawab mereka masing-masing dan tahu bagaimana menangani berbagai tugas dan tantangan yang muncul. Prosedur yang jelas membantu dalam mengarahkan pelaksana kebijakan untuk mengikuti jalur yang benar, sementara koordinasi yang baik memastikan bahwa berbagai bagian dalam birokrasi bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan.

Sebaliknya, birokrasi yang rumit, tidak terstruktur dengan baik, atau kurang efisien dapat menghambat implementasi kebijakan secara signifikan. Hambatan-hambatan seperti tumpang tindih wewenang, kurangnya koordinasi antarunit, atau rantai komando yang terlalu panjang dan lamban bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan di lapangan. Ketidakjelasan dalam alur birokrasi juga bisa menciptakan kebingungan di antara pelaksana, membuat mereka tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan, atau bahkan menunda tindakan yang diperlukan. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang seharusnya bisa berjalan lancar berisiko terganggu atau tidak mencapai hasil yang optimal karena inefisiensi birokrasi.

Oleh karena itu, reformasi atau perbaikan struktur birokrasi sering kali diperlukan untuk meningkatkan kemampuan implementasi kebijakan dengan efektif.